



Pancasila sebagai Fondasi dalam Mewujudkan Kecerdasan Buatan yang Etis di Era Digital

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiah Nur Atqiya², Habib Ahmad Nazri³,
Aulia Ashari⁴, Hasanah Cinta⁵

¹Direktur Pusat Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

^{3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiv.anura@gmail.com², hashoganvin30@gmail.com³,
auliaazhari0803@gmail.com⁴, hasanahcinta04@gmail.com⁵

Alamat : Jl. Pandawa, Dusun IV, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Koresponden Penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: *The rapid development of artificial intelligence (AI) in the digital era has raised a variety of ethical issues that urgently need to be addressed wisely. In Indonesia, Pancasila as the foundation of the state has significant potential to become an ethical foundation in the development of responsible and humanity-oriented AI. This research uses a qualitative method with a literature study approach, examining various academic sources, such as relevant journals, books, and scientific articles. The analysis was conducted through content analysis techniques and reinforced with source triangulation to ensure the validity of the data. The results showed that the values of each precept in Pancasila are highly relevant to the ethical principles of AI, such as moral and spiritual responsibility reflected in the first precept, respect for human rights in the second precept, and the importance of democratization of technology and equitable distribution of benefits stated in the fourth and fifth precepts. Therefore, the integration of Pancasila values in every stage of AI development and application is crucial. This is so that the resulting technology is not only technically superior, but also reflects justice, inclusiveness, and commitment to human values. Collaboration between government, academia, industry, and society is the key to making Indonesia a pioneer in ethical and humanist AI development.*

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Digital Era, Pancasila

Abstrak: Perkembangan pesat kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) di era digital telah menimbulkan beragam isu etis yang mendesak untuk ditanggapi dengan bijak. Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi fondasi etis dalam pengembangan AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengkaji berbagai sumber akademik, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui teknik content analysis dan diperkuat dengan triangulasi sumber untuk memastikan kevalidan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila sangat relevan dengan prinsip-prinsip etika AI, seperti tanggung jawab moral dan spiritual yang tercermin dalam sila pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia di sila kedua, serta pentingnya demokratisasi teknologi dan pemerataan manfaat yang dinyatakan dalam sila keempat dan kelima. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahap pengembangan dan penerapan AI sangatlah krusial. Hal ini bertujuan agar teknologi yang dihasilkan tidak hanya unggul dari segi teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan, inklusivitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam pengembangan AI yang etis dan humanis.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan (AI), Era Digital, Pancasila

1. PENDAHULUAN

Kecerdasan Buatan (AI) adalah bidang ilmu yang relatif baru, secara resmi dimulai pada tahun 1956, meskipun penelitian telah dilakukan sejak sekitar lima tahun sebelumnya. Seperti halnya genetika modern, AI sering dipandang sebagai salah satu sektor dengan

prospek terbaik oleh para ilmuwan dari disiplin ilmu lain. Seorang mahasiswa fisika mungkin merasa bahwa ide-ide besar telah ditemukan oleh tokoh-tokoh seperti Galileo, Newton, dan Einstein, sehingga diperlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat memberikan kontribusi baru (MA Rosid, 2022)

Di era masa kini, kecerdasan buatan (AI) menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi AI yang terus berkembang, muncul beragam pertanyaan etis yang menyertainya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah membawa kita memasuki zaman di mana hampir segala hal berakar pada teknologi digital (Santo Gitakarma dan Putu Ary Sri Tjahyanti, 2022). Semua aspek kehidupan kini dapat dilakukan dengan perangkat yang serba guna. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, kita cenderung beranggapan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengendalikan dunia (Kirani dan Najicha, 2022). Namun, ketika manusia mengarahkan perkembangan ini, mereka akan menghadapi perubahan yang disruptif serta tantangan baru yang dapat memengaruhi struktur ekonomi, hukum, dan etika (Hammadi, 2020). Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar filosofis negara menawarkan fondasi etis yang kokoh untuk mengarahkan pengembangan AI. Teknologi berbasis kecerdasan buatan telah meraih berbagai pencapaian signifikan, termasuk pengenalan wajah, Diagnosis medis dan mobil otonom adalah dua bidang di mana kecerdasan buatan (AI) memberikan janji manfaat yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, serta peningkatan kesejahteraan dan keselamatan umat manusia (Siau dan Wang, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana memadukan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan AI sehingga sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Penerapan nilai-nilai yang termuat dalam Ideologi Pancasila perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan harapan dapat membangun komunitas yang mencerminkan sikap-sikap yang selaras dengan nilai-nilai tersebut (Teuku Muharam Rizqullah dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022).

Meskipun Pancasila telah menjadi bagian dari Konstitusi Indonesia, penerapannya saat ini kerap kali kurang dijadikan kebiasaan. Namun, nilai-nilai Pancasila tetap berperan penting dalam kehidupan kita karena menjadi dasar bagi struktur negara (Dewi dan Najicha, 2022a). Penekanan pada sila ketiga Pancasila, yang menggarisbawahi pentingnya persatuan Indonesia dalam keberagaman, tidak bisa diabaikan (Kompasiana, 2023). Prinsip persatuan ini mencerminkan semangat nasionalisme yang harus diterapkan dalam setiap

aspek kehidupan kita (BPIP, 2023). Dengan mengusung semangat nasionalisme tersebut, Indonesia dapat berkembang lebih baik dan berkeadilan (CNN Indonesia, 2023).

Keamanan bangsa adalah aspek penting yang berdampak pada terciptanya persatuan dan kesatuan di masyarakat (Fitri Lintang dan Ulfatun Najicha, 2022). Kecerdasan buatan (AI) telah memberikan kontribusi positif di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta sektor pertahanan dan keamanan (Michael Reskiantio Pabubung, 2021).

Sebagai ideologis yang mendasari bangsa Indonesia, Pancasila bukanlah hasil ciptaan negara, melainkan merupakan warisan spiritual, moral, dan budaya yang telah menjadi bagian integral dari keyakinan masyarakat Indonesia (Nur Fadhila dan Najicha, 2021). Karena itu, nilai-nilai Pancasila akan terus mengalami evolusi seiring perkembangan masyarakat. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sebagai warisan budaya bangsa, melainkan nilai-nilai yang perlu dihormati dengan tinggi. Tentu saja, dalam penerapannya, terdapat berbagai rintangan dan tantangan yang harus dihadapi (Ambarningrum dan Najicha, 2022).

Melalui pendekatan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif baru terkait bagaimana teknologi canggih dapat dikembangkan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang mendalam. Hal ini seiring dengan ideologi Pancasila dalam mewujudkan tujuan negara di era modernisasi serta pengembangan dalam ilmu bidang keilmuan dan teknologi yang terus mengalami transformasi (Zulfa dan Najicha, 2022).

Pada era digital saat ini akses untuk memperoleh berbagai sumber informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, termasuk bahan pembelajaran, jurnal ilmiah, dan sumber daya pendidikan lainnya (Mahesti Shakira dan Ulfatun Najicha, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan deskriptif. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis beragam referensi akademik seperti jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang membahas kecerdasan buatan, etika teknologi, serta relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan AI. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang memungkinkan peneliti untuk mengategorikan dan menginterpretasikan data secara sistematis.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi kredibel (misalnya: Rosid, 2022; Siau & Wang, 2020; Murtiningsih, 2023) agar kesimpulan yang diambil lebih objektif dan akurat.

3. PEMBAHASAN

Kecerdasan buatan, atau Artificial Intelligence (AI), berasal dari kata "intelligence" yang berakar dari bahasa Latin "intelligo," berarti "saya mengerti." Dengan demikian, "intelligence" merujuk pada kemampuan untuk memahami dan bertindak secara efektif. (I. Sulistyowati, 2021)

AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin cerdas untuk meniru kemampuan kognitif manusia (Djoko, Susanti, dan Hermanto 2023). Ia melibatkan prinsip-prinsip ilmu data, matematika, logika, linguistik, psikologi, dan teknik computer (Djoko, Susanti, dan Hermanto 2023). AI dirancang untuk melakukan tugas seperti pengenalan pola, pembelajaran mesin, perencanaan, dan penalaran (Djoko, Susanti, dan Hermanto 2023). Kemampuan ini memungkinkan AI menyelesaikan masalah kompleks serta melakukan fungsi yang biasanya membutuhkan intelijensi manusia (Djoko, Susanti, dan Hermanto 2023).

Di era transformasi digital ini, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi kekuatan yang transformatif dan meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari asisten virtual yang membantu kita dalam aktivitas sehari-hari hingga kendaraan otonom (Nathaniel Steave Harjanto, Fatma Ulfatun Najich, 2024) yang menawarkan transportasi yang lebih efisien dan aman, AI memiliki potensi untuk merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI yang seringkali membuat kita terpesona, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi landasan etika dan moral dalam pengembangan serta penerapannya di tanah air (Nathaniel Steave Harjanto, Fatma Ulfatun Najich, 2024).

Di era digital yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI), ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila mempunyai andil yang penting sebagai fondasi etika dalam pengembangan AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada manusia. Nilai-nilai luhur Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa yang menekankan pentingnya aspek spiritual dan moral, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di atas segalanya, serta Persatuan Indonesia yang menjaga keharmonisan sosial, menjadi pedoman utama dalam merancang teknologi AI yang tidak hanya canggih dari segi teknis, tetapi juga berprinsip

humanis dan adil. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, pengembangan AI di Indonesia dapat menghindari potensi bias, diskriminasi, serta pelanggaran privasi, sekaligus memastikan bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila mengharuskan adanya keterlibatan berbagai pihak secara transparan dan akuntabel dalam proses pengembangan dan penerapan AI. Dengan demikian, teknologi ini dapat berfungsi sebagai alat yang memperkuat cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab di tengah modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan (Muhamad, Nasoha, Atqiya, dan Widiya 2024).

Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila bukan hanya sekumpulan sila-sila yang tertulis di atas kertas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Ia merupakan kompas moral yang seharusnya memandu setiap langkah dalam pengembangan AI di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila—seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas X Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) harus menjadi fondasi filosofis yang kukuh dalam setiap tahapan pengembangan AI, mulai dari perumusan konsep, desain, hingga penerapan dan evaluasi.

Pengembangan AI yang berlandaskan Pancasila dapat menciptakan teknologi yang tidak hanya canggih secara teknis, melainkan humanis dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Susanto, 2021). AI harus dirancang dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya (Wibowo & Lestari, 2020). Sebagai contoh, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendeteksi penyakit sejak dini, atau mempersonalisasi pendidikan (Yuliana, 2022). Namun, semua potensi ini harus diimbangi dengan kesadaran etika dan moral yang mendalam (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Jangan sampai teknologi AI yang kita kembangkan justru menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, atau bahkan mengancam hak asasi manusia (UNESCO, 2021). Salah satu tantangan utama dalam pengembangan AI adalah potensi diskriminasi dan ketidakadilan. Algoritma AI yang tidak dirancang dengan cermat dan tidak diuji secara menyeluruh dapat memperpetuasi bias yang sudah ada dalam data pelatihan, sehingga menghasilkan keputusan yang diskriminatif dan merugikan kelompok tertentu. Misalnya, AI yang digunakan dalam proses perekrutan kerja dapat diskriminatif

terhadap pelamar dari kelompok minoritas jika data pelatihan yang digunakan mengandung bias. Oleh sebab itu, sangat krusial bagi para pengembang AI untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka ciptakan adil, inklusif, dan mematuhi hak asasi manusia.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di era digital membawa serta tantangan etis yang kompleks (Yuliana, 2022). Oleh karena itu, diperlukan landasan moral yang kokoh untuk memastikan bahwa pengembangan AI tetap berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan (Susanto, 2021). Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, menawarkan fondasi etis yang sangat relevan dalam konteks ini (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Dalam setiap tahapan pengembangan AI, didalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila berupa nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan social. (Wibowo & Lestari, 2020).

Sebagai contoh, sila pertama Pancasila mengingatkan kita akan pentingnya etika dan tanggung jawab moral dalam penggunaan AI, agar teknologi ini tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017; Susanto, 2021). Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mencegah terjadinya bias diskriminatif dalam algoritma AI (UNESCO, 2021; Wibowo & Lestari, 2020). Sila ketiga mendorong kita untuk menjaga persatuan bangsa dengan menghindari pemanfaatan AI yang dapat memecah belah masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Sementara itu, sila keempat menekankan perlunya demokratisasi teknologi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel (Yuliana, 2022). Terakhir, sila kelima menggarisbawahi pentingnya distribusi manfaat AI yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, agar teknologi ini menjadi alat pemersatu dan pemberdaya masyarakat secara adil (Susanto, 2021).

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan AI tidak hanya menjamin kemajuan teknologi yang canggih, tetapi juga memastikan bahwa teknologi tersebut berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab sesuai cita-cita bangsa (Muhamad, Nasoha, Atqiya, Wibowo, et al. 2024).

Selain itu, pengembangan AI juga harus memperhatikan aspek privasi dan keamanan data (UNESCO, 2021). Data pribadi adalah aset berharga yang perlu dilindungi dari penyalahgunaan (Setiawan, 2022). Regulasi yang ketat dan transparan mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi sangat penting untuk menghindari potensi pelanggaran privasi oleh AI (Kominfo, 2020). Jangan sampai data

pribadi masyarakat dieksploitasi untuk kepentingan komersial atau politik tanpa persetujuan yang bersangkutan (Susanto, 2021).

Di era keterbukaan informasi saat ini, literasi digital masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting (Putri, 2021). Masyarakat perlu mendapat edukasi mengenai potensi dan risiko AI agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskursus publik tentang pengembangan teknologi ini (Wibowo & Lestari, 2020). Dengan pemahaman yang baik mengenai AI, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perumusan kebijakan dan regulasi terkait (Yuliana, 2022). Jangan sampai masyarakat hanya berperan sebagai konsumen pasif teknologi AI tanpa memiliki pemahaman yang cukup untuk secara kritis mengevaluasi dampak AI terhadap kehidupan mereka (Susanto, 2021).

Dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi aspek krusial untuk memastikan teknologi ini sejalan dengan tujuan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam pengembangan AI agar teknologi ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama (Muhamad, Nasoha, Atqiya, dan Widiya 2024). Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) serta pencegahan diskriminasi dalam algoritma AI.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa dalam mencegah potensi terpecah belahnya masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan AI, maka sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017; Susanto, 2021). Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan urgensinya demokratisasi dalam teknologi AI melalui partisipasi yang transparan dan akuntabel dari berbagai pemangku kepentingan (Yuliana, 2022).

Akhirnya, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut penyaluran manfaat AI secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga teknologi ini dapat dinikmati oleh semua pihak (UNESCO, 2021; Wibowo & Lestari, 2020). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan AI akan menciptakan teknologi yang beretika, adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia (Susanto, 2021).

Lee mengakui bahwa negara-negara dengan keunggulan teknologi AI berpotensi mendominasi industri global, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan merugikan negara-negara yang kurang maju (AB. Darmawan, 2020).

Dengan demikian, pengembangan AI di Indonesia harus sejalan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Pancasila harus menjadi landasan yang kuat dalam aspek etika dan moral di setiap tahap pengembangan dan penerapan AI (Susanto, 2021). Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa teknologi AI yang kita ciptakan bersifat humanis, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia (UNESCO, 2021; Wibowo & Lestari, 2020). AI seharusnya menjadi alat untuk menggapai tujuan bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab (Yuliana, 2022).

Lebih dari sekadar kerangka filosofis, penerapan Pancasila harus dilakukan secara konkret dalam semua aspek pengembangan AI (Irawan, 2024). Ini memerlukan kerjasama di antara beragam pihak, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat (Kompas, 2023). Pemerintah harus menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pengembangan dan penggunaan AI berdasarkan nilai-nilai Pancasila (AICI UMG, 2023). Akademisi memiliki peran penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan AI yang etis dan bertanggung jawab (Afiahayati, 2023). Sementara itu, industri diharapkan dapat menciptakan AI yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukan hanya keuntungan semata (East Ventures, 2023). Masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif dalam diskursus publik mengenai AI dan memberikan masukan yang konstruktif untuk pengembangan teknologi ini (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2023). Indonesia membutuhkan pengembangan AI, tetapi harus berfokus pada prinsip-prinsip etika seperti menghormati martabat manusia, melindungi privasi, memastikan keadilan, dan mencegah diskriminasi. Selain itu, penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan pengguna, pendidikan, kesadaran, serta pembuatan standar dan peraturan AI yang jelas. (Babys, 2024)

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua elemen bangsa. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan di dalam setiap aspek pengembangan AI penting untuk menciptakan etika dan moralitas, sehingga teknologi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama (Muhammad et al. 2024). Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan perlunya menghormati hak asasi manusia serta mencegah diskriminasi dalam algoritma AI (Siti Murtiningsih, 2023).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa dalam mencegah potensi terpecah belahnya masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan AI, maka sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijakan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengamanatkan perlunya mendemokratisasi teknologi AI melalui partisipasi yang transparan dan akuntabel dari berbagai pemangku kepentingan (Siti Murtiningsih, 2023).

Pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila mengharuskan kita untuk menerapkan pendekatan yang holistik, mencakup etika, regulasi, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pengembangan AI harus mematuhi prinsip-prinsip spiritual dan moral, serta menghindari penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian (Nasoha et al.). Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan aspek krusial terhadap penghormatan hak asasi manusia serta upaya mencegah diskriminasi yang dapat muncul melalui algoritma AI (Siti Murtiningsih, 2023).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa dalam mencegah potensi terpecah belahnya masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan AI, maka sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa . Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijakan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menggarisbawahi perlunya demokratisasi selama proses pengembangan teknologi AI, yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel (Siti Murtiningsih, 2023).

Akhirnya, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mendorong agar manfaat dari teknologi AI didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah perlu menetapkan standar etika yang jelas, para akademisi melakukan penelitian dengan tanggung jawab, industri harus mengembangkan AI yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, dan masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi publik mengenai AI (Nasoha, Atqiyah, dan Aulia 2025).

Akhirnya, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari AI, sehingga teknologi ini tidak hanya memberi keuntungan kepada sekelompok orang saja.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi di antara semua pihak, kita dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat pengembangan AI yang humanis dan berkeadilan. AI tidak hanya menjadi kekuatan transformatif yang mengubah cara kita hidup, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai luhur bangsa dan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Sejatinnya kekuatan suatu negara, juga di Indonesia ada di rumah rumah tangganya (Rhenald Kasali, 2017). Nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan, diantaranya:

- a. Pada sila pertama menyoroti nilai-nilai spiritual dan moral yang berperan pening dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan AI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). AI harus dikembangkan dengan memperhatikan etika dan tanggung jawab moral agar tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama (Susanto, 2021). Dalam pengaturan, pemerintah dapat menetapkan standar etika yang menjamin AI tidak digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan (UNESCO, 2021).
- b. Pada sila kedua menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan aspek krusial dalam proses pengembangan AI (UNESCO, 2021; Wibowo & Lestari, 2020). AI perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan cara yang adil dan beradab, tanpa adanya bias diskriminatif yang dapat merugikan kelompok tertentu (Setiawan, 2022).
- c. Pada sila ketiga menegaskan betapa pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pengembangan AI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Teknologi AI seharusnya tidak dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat ataupun menyebarkan informasi yang salah yang dapat merugikan harmoni sosial (Putri, 2021).
- d. Pada sila ke empat Demokratisasi teknologi AI sangat krusial agar pengembangan ini menyertakan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor industri. implementasi AI dalam pengambilan keputusan publik harus melibatkan transparansi dan akuntabilitas agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi (Siti Murtiningsih, 2023)
- e. Pada sila ke lima menekankan pentingnya distribusi akses yang merata terhadap manfaat AI, sehingga tidak hanya dirasakan oleh beberapa pihak tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas. Di India, AI telah diterapkan untuk meningkatkan hasil pertanian melalui sistem prediksi cuaca yang berbasis machine learning. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang serupa untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di daerah terpencil. (Nathaniel Steave Harjanto, Fatma Ulfatun Najich, 2024)

4. KESIMPULAN

Jurnal ini menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang etis dan berpusat pada manusia. Dengan

pesatnya perkembangan AI di era digital, muncul berbagai tantangan etis, seperti diskriminasi algoritmik, ketidakadilan sosial, pelanggaran privasi, dan ancaman terhadap persatuan bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam setiap tahapan pengembangan AI, mulai dari konseptualisasi, desain, implementasi, hingga evaluasi.

Setiap sila dalam Pancasila memberikan prinsip etis yang relevan dengan pengembangan AI:

- a. Sila pertama menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab moral dalam pengembangan AI agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama.
- b. Sila kedua menyoroti penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga AI harus dikembangkan secara adil dan tanpa bias diskriminatif.
- c. Sila ketiga menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan tidak menggunakan AI sebagai alat untuk menyebarkan disinformasi atau memecah belah masyarakat. .
- d. Sila keempat menekankan perlunya demokratisasi teknologi AI, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis AI.
- e. Sila kelima menggarisbawahi pentingnya distribusi manfaat AI secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang terjangkau teknologi.

Dalam implementasinya, kerja sama antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat menjadi faktor utama untuk mewujudkan AI yang humanis dan berkeadilan. Kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila harus diterapkan guna memastikan AI berkembang tidak hanya secara teknis tetapi juga secara etis. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menjadi contoh dalam pengembangan AI yang sejalan dengan prinsip moral, sosial, dan budaya bangsa. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi merupakan kompas moral yang dapat membimbing perkembangan AI agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiahayati, A. (2023). *Pancasila sebagai fondasi untuk kecerdasan buatan yang etis dalam ranah digital*.
- AICI UMG. (2023). *Regulasi AI di Indonesia: Perkembangan hukum dan kebijakan*.
- Ambarningrum, N. H. T., & Najicha, F. U. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila di era pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2624–2629.

- Babys, R. A., Babys, S. A. M., & Benu, E. (2024). Filsafat artificial intelligence (AI) dan kemanfaatan untuk mewujudkan Indonesia yang berperadaban. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi, 5(2)*.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2020). *Strategi nasional untuk kecerdasan artifisial 2020–2045*.
- BPIP. (2023). Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila di lingkungan keluarga. Diakses dari <https://bpip.go.id>
- CNN Indonesia. (2023). Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila dan penerapannya. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Darmawan, A. B. (2020). Kekuatan artificial intelligence Tiongkok dan kekhawatiran masyarakat global: Resensi buku. *Indonesian Perspective, 5(2)*, 216–220.
- Dewi, N. N., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya menjaga nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi generasi Z. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 2(2)*.
- East Ventures. (2023). AI di Indonesia: Situasi saat ini dan peluangnya.
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 4(2)*, 204–212.
- Fitri Lintang, F. L., & Najicha, F. U. (2022). Nilai-nilai sila persatuan Indonesia dalam keberagaman kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 11(1)*, 79–85.
- Irawan, I. (2024). Penerapan etika Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.
- Joko Sutrisno, Susanti, A., & Hartono. (2023). Mengoptimalkan pembelajaran: Peran transformasi AI dalam dunia pendidikan.
- Kasali, R. (2017). *Strawberry generation: Mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh*. Mizan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023a). AI tidak terlepas dari berbagai aktivitas masyarakat, Kominfo siap luncurkan panduan etik penggunaan AI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023b). Kecerdasan buatan, membangun karakter bangsa di era digital.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA kelas X*.
- Kirani, A. P., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman dalam menghadapi era Society 5.0 mendatang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA, 8(2)*.
- Kompas. (2023). Pancasila bisa jadi dasar etika penggunaan kecerdasan buatan.

- Kompasiana. (2023). Penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Diakses dari <https://www.kompasiana.com>
- Mahesti Shakira, A., & Najicha, F. U. (n.d.). Sinergi teknologi informasi dan pendidikan kewarganegaraan di era digital.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Widiya, A. A. (2024). Peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dinamika sejarah dan perkembangannya, 2, 379–395.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Wibowo, S., Ulfarisah, A., & Nugroho, M. S. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum adat di Indonesia: Sebuah tinjauan filosofis dan sosiologis. *Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, 12(2).
- Muhammad, A., Nasoha, M., Keizafa, M., Agachi, Y., Muhammad, M. R., Apriyandi, M. B., & Romadoni, R. (2024). Pancasila dan penguatan hukum tata negara dalam era demokrasi. *1*(2), 123–138.
- Murtiningsih, S. (2023). Konsep penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui pembelajaran pendidikan Pancasila. *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam*, 6(2), 112–117.
- Nasoha, A. M. M., Atqiyah, A. N., & Aulia, D. R. (2025). Konsep dan urgensi dasar negara: Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *5 (UUD 1945)*.
- Nathaniel Steave Harjanto, & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 30–37.
- Nuryadi, & Tholib. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA kelas X*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pabubung, M. R. (2021). Epistemologi kecerdasan buatan (AI) dan pentingnya ilmu etika dalam pendidikan interdisipliner. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 152–159.
- Rosid, M. A. (2022). *Buku ajar kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI)*. Umsida Press.
- Santo Gitakarma, M., & Tjahyanti, L. P. A. S. (2022). Peranan Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam teknologi saat ini. *KOMTEKS*, 1(1).
- Siau, K., & Wang, W. (2020). Artificial intelligence (AI) ethics: Ethics of AI and ethical AI. *Journal of Database Management (JDM)*, 31(2), 74–87.
- Sulistyowati, I. (2021). *Buku ajar mata kuliah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)*. Umsida Press.
- Susanto, H. (2021). *Etika teknologi dan kecerdasan buatan dalam konteks Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Teuku Muharam Rizqullah, & Najicha, F. U. (2022). Pengimplementasian ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Universitas Bina Nusantara Malang. (2022). Tantangan dalam pengembangan teknologi artificial intelligence di Indonesia.
- Universitas Gadjah Mada. (2023). Menilik potensi pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam ragam sektor di Indonesia.
- Wibowo, A., & Lestari, M. (2020). Kecerdasan buatan untuk pelayanan publik: Peluang dan tantangan di Indonesia. Gramedia.
- Yuliana, D. (2022). *AI dalam dunia pendidikan: Menuju pembelajaran yang inklusif dan personal*. Remaja Rosdakarya.
- Zulfa, A., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi penguatan identitas nasional dalam menghadapi Society 5.0 di era globalisasi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan, 3